Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010)

Yusnanita¹, M Syahnun Harahap²
yusnanita@gmail.com¹, msyahnunharahap@unsurya.ac.id²
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia dalam membentuk keluarga yang bahagia. Menurut perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat material dan formal. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana anggota TNI pelaku perkawinan kedua tanpa izin istri pertama? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI pelaku perkawinan kedua tanpa izin istri pertama? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa perkawinan di bawah tangan memenuhi syarat-syarat materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuiinya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan di bawah tangan tidak tergolong makna perkawinan menurut ketentuan Pasal 279 KUHP. Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010 telah benar, unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu terpenuhi karena perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pengertian perkawinan yang dimaksud Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Anjum memberikan 2 pilihan cara penyelesaian, yaitu mencabut laporan dari pihak korban dan tersangka akan dikenakan pelanggaran Disiplin Militer atau pihak korban tetap ingin melanjutkan laporan sehingga akan diproses menuju tahap selanjutnya dan akan dikenakan pelanggaran Tindak Pidana Militer.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota TNI, Perkawinan, Tanpa Izin Istri Pertama

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond *between humans in forming a happy family. According to the positive legal perspective, marriage is considered valid if it meets material and formal requirements. Therefore, it is very interesting and important to examine further whether the judge's consideration was to impose a criminal verdict on a TNI member who committed a second marriage without the permission of the first wife? and what is the criminal liability of TNI members who commit second marriages without the permission of the first wife? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that private marriages fulfill the material requirements of marriage, but do not fulfill the formal requirements. This has implications for the non-*

recognition of marriage according to positive law in force in Indonesia, so that marriage under the hand is not included in the meaning of marriage according to the provisions of Article 279 of the Criminal Code. Supreme Court Decision Number 157 K/MIL/2010 is correct, the element of entering into a marriage while knowing that the marriage or marriages are a legal obstacle to that being fulfilled because the underhanded marriage carried out by the defendant is included in the definition of marriage as intended by Article 279 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Anjum provides 2 options for resolution, namely withdrawing the report from the victim and the suspect will be subject to a Military Discipline violation or the victim still wants to continue the report so it will be processed to the next stage and will be subject to a Military Crime violation.

Keywords: *Criminal Liability, TNI Member, Marriage, Without First Wife's Consent*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Seiring perkembangannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Mengapa demikian? Karena sejak lahir hingga meninggal dunia manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Demikianlah kodrat manusia disamping sebagai makhluk individu manusia juga berperan sebagai makhluk sosial (Agus Dwiyono, dkk,2014).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan, dan kepentingan sendiri-sendiri. Keinginan dan kepentingan manusia tersebut, satu dengan yang lainnya tidak selalu sama atau seirama. Ketika keinginan dan kepentingan berbeda atau malah bertentangan maka akan menimbulkan gangguan hubungan diantara mereka. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat diperlukan norma, kaidah, atau peraturan hidup.

Keberadaan peraturan hidup sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Bagaimana ia harus bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat, agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tentram, aman, dan harmonis. Peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa demi terjaminnya tata tertib dalam masyarakat inilah yang sering disebut peraturan hukum atau kaidah hukum.

Salah satu peraturan atau kaidah hukum yang diatur oleh negara adalah mengenai perkawinan. Ketentuan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi Kebijakan dari UU No 16 Tahun 2019 berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberi peluang seorang pria mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya. Hal ini telah diatur secara limitatif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan monogami sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas dapat dikesampingkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak, atau yang sering disebut ditengah masyarakat sebagai poligami.

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut di atas, artinya bila seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 4 disebut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dari ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 inilah yang seringkali menjadi persoalan, dimana seorang suami yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih (poligami) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari istri yang pertama (sebelumnya). Seringkali yang terjadi di tengah masyarakat disaat perkawinan poligami biasanya dilakukan di bawah tangan atau biasa disebut nikah siri. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah kawin dibawah tangan atau semacamnya dan belum ada aturan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis istilah kawin di bawah tangan atau nikah siri ini dimaksudkan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Harpani Matnuh,2016). Karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan".

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan, ada 2 (dua) pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan (Hartono Mardjono,1997).

Pada zaman sekarang ini, kebanyakan suami yang melakukan poligami, tidak menggunakan mekanisme pengajuan izin pada Pengadilan dan lebih mirisnya lagi tidak memiliki izin untuk melakukan perkawinan tersebut dari istri perkawinan pertamanya, lalu sembunyi-sembunyi melakukan perkawinan lagi dengan cara nikah siri, sehingga hak-hak istri pada perkawinan pertama banyak di cederaikan dengan adanya poligami siri yang dilakukan oleh suami.

Izin dari istri pertama seolah bukan suatu hal yang dipandang penting dalam praktik nikah siri. Padahal izin tersebut merupakan hal yang penting, tidak bisa seorang suami serta merta melakukan perkawinan lagi tanpa mengindahkan status seorang istri. Hal ini menjadi sebuah problematika yang semakin rumit. Biasanya seorang istri yang dipoligami oleh suaminya cenderung diam meski ia sudah tahu jika suaminya telah mencederaikan haknya sebagai istri, namun ada juga beberapa kasus poligami siri tersebut dipermasalahkan ke meja hijau atau Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Perkara Nomor 157 K/Mil/2010 terdakwa Sumarno melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi Yuliana pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 dengan alamat Dukuh Srendang Rt. 04 Rw. 04 Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, tanpa izin/persetujuan dari Saksi Solikah baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan diketahui terdakwa Sumarno dengan saksi korban Solikah masih terikat perkawinan yang sah. Proses hukum akhirnya bergulir ke Pengadilan Militer II-10 Semarang. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHP. Sehubungan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) butir ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bertitik tolak dari kasus tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perkawinan kedua (poligami) secara siri sehingga peristiwa tersebut semestinya tidak diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya peristiwa perkawinan tersebut sebenarnya dianggap tidak ada oleh hukum. oleh sebab itu, putusan hakim di atas tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, tetapi secara hukum nasional perkawinan kedua (poligami) terdakwa tidak diakui karena merupakan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010)”.

Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana anggota TNI Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010 pelaku perkawinan kedua tanpa izin istri pertama? dan,
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010 pelaku perkawinan kedua tanpa izin istri pertama?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”. (Saefullah Wiradipradja, 2015)

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, 2014)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan kajian hukum penerapan Pasal 279 KUHP terhadap pelaku poligami siri tanpa izin istri pertama.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdik Pom Cimahi pada tahun 1992/1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Pom di Pusdik Pom Cimahi selama 5 (lima) bulan. Pada tahun 1993 ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serka NRP. 219130094180371.

Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Solikah (Saksi-6) pada tanggal 28 Mei 1996 di kantor KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Mranggen Nomor: 221/136/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 dimana dari hasil pernikahannya dengan Saksi-6 (Solikah) telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Aditya Saga Dirgantara umur 12 (dua belas) tahun dan Riko Reza Nugroho umur 11 (sebelas) tahun.

Pada bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Yuliana) di Wisma Yukarti Lokalisasi Gambilangu Semarang sebagai Mucikari kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacarana.

Selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 (Yuliana) semakin intim lalu beberapa minggu kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Yuliana) untuk melakukan hubungan badan di Wisma Yukarti lokalisasi Gambilangu Semarang, maka setiap Terdakwa datang ke Wisma Yukarti tersebut menjumpai Saksi-2 (Yuliana) selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Yuliana) setelah selesai kerja ataupun bila Terdakwa kangen.

Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa nikah lagi secara siri dengan Yuliana (Saksi-2) di rumah Bapak Rasman dengan alamat Dukuh Srendang Rt. 04 Rw. 04 Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal tanpa ada ijin dari Saksi-6 (Solikah) selaku istri sahnya, yang menikahkan adalah Saksi-5 (Sdr. Muh. Asmuni) selaku penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-6 yaitu (Sdr. Rasman) dan bertindak sebagai Saksi pernikahan siri adalah Sdr. Rupi'I (Saksi-2) Sdr. Jarwadi dan teman Terdakwa yang bernama Sdr.Tono.

Terdakwa pada waktu melaksanakan pernikahan siri terlebih dahulu melaksanakan ijab kobul yang dipandu oleh Kyai Asmuni (Saksi-5) sebagai penghulu (amil), dengan mengucapkan ijab : "Saya nikahkan Sdri. Yuliana binti Rasman dengan Sdr. Sumarno bin Sawi dengan mas kawin (mahar) uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai" kemudian Terdakwa mengucapkan kobul sebagai berikut : "Saya terima nikahnya Sdri. Yuliana binti Rasman dengan mas kawin (mahar) uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai".

Terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya, karena Terdakwa pada saat melakukan pernikahan dengan Sdri. Yuliana (Saksi-6) masih terikat pernikahan dan belum cerai dengan istri yang sah yaitu Saksi-6 (Solikah) sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 1996 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi-6 (Solikah) di Jalan Jagalan Rt. 01Rw. 02 Mranggen, Kabupaten Demak, Propensi Jawa Tengah.

Dakwaan Oditur

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 21 Januari 2010 sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan pada hal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Tuntutan Oditur

Dengan mengingat pasal tersebut di atas, Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Kami mohon agar Terdakwa Serka Sumarno NRP 21930094180371 dijatuhi hukuman: Pidana Pokok: Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer. Menetapkan tentang barang bukti:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Nomor: 221/36/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 An. Serka Sumarno dan Sdri. Solikah.
- 1 (satu) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin Denpomdam IV/Dip selaku Ankum Nomor: Skep/01/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000.
- 2 (dua) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin Danpomdam IV/Dip selaku Ankum Nomo: Skep/04/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001.
- 1 (satu) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin Dandenpom IV/5 Semarang selaku Ankum Nomor: Skep/02/IX/2002 tanggal 27 September 2002.
- 2 (dua) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin Dandenpom IV/5 Semarang selaku Ankum Nomor: Skep/01/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003.
- 2 (dua) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin Dandenpom IV/5 Semarang selaku Ankum Nomor: Skep/01/V/2005 tanggal 31 Mei 2005.
- 2 (dua) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin Danpomdam IV/Dip selaku Ankum Nomor: Skep/237/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
- Putusan Pengadilan Militer Il-10 Semarang Nomor: PUT/71-K/PM.II-10/AD/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang penjatuhan pidana atas nama Serka Sumarno Nrp. 21930094180371 selama 2 (dua) bulan penjara karena bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 103 (1) KUHPM dan Pasal 66 ke-1 KUHPM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang: Nihil.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama

Makamah Agung tidak membenarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut. Karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) dan merupakan bagian dari kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak.

Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

3. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 157 K/MIL/2010

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SUMARNO, Serka Nrp. 21930094180371 tersebut.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Analisa Penulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perkawinan yang tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal yaitu 277, 278, 279, dan 280.

Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam pasal 279 KUHP yang menyatakan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - 1) Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - 2) Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu
- b. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.

Terkait dengan penulisan sebagaimana rumusan masalah di atas yang dikaitkan dengan Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010, yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang yaitu Pasal 279 Ayat (1) Butir 1 KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa "barangsiapa" tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang
- b. Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu.

Dalam unsur ini, syarat agar seorang dapat dipidanakan sebagaimana Pasal 279 Ayat (1) Butir 1, ialah orang itu harus sengaja mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya belum dilepaskan. Putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan alasan sebagai berikut:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

Hukum negara/nasional (hukum positif) mengakui suatu peristiwa perkawinan apabila perkawinan tersebut sah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah, sehingga, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bersifat kumulatif. Peristiwa perkawinan baru dianggap ada apabila telah memenuhi kedua ayat yang diuraikan dalam pasal tersebut (Rochxy & Bayu Lesmana, 2013)

Terkait dengan perkara dalam Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010, perkawinan Terdakwa dilakukan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Islam. Jadi, perkawinan tersebut sah secara hukum agama.

Namun, perkawinan yang dilakukan terdakwa tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang disyaratkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang sudah dilangsungkan tidak dilakukan dihadapan dan atau di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum. Akibat dari tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka peristiwa perkawinan yang dilakukan terdakwa tidak diakui menurut hukum negara/nasional (hukum positif). Tidak diakui menurut hukum negara (hukum positif) berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu jika memenuhi unsur sebagaimana disyaratkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan melalui permohonan kepada pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami untuk melakukan perkawinan lagi, termasuk ada atau tidaknya izin dari istri, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apabila tidak mendapat izin, maka hal ini menjadi penghalang untuk yang dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP untuk melakukan perkawinan selanjutnya.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010 telah benar. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu terpenuhi karena perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pengertian perkawinan yang dimaksud Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis berpendapat untuk mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sudah tepat. Hal ini merupakan sebagai efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana serupa.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama

Sikap Disiplin penting bagi aparat Negara baik Sipil maupun Militer, untuk dapat membina dan melaksanakan kehidupan diberbagai aspek sesuai dengan pedoman kaidah hukum peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pembinaan dan pelaksanaan disiplin dilingkungan organisasi TNI khususnya untuk Militer ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Pelanggaran Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota Militer dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada Atasan yang berhak menghukum. Kewenangan Atasan yang melekat pada jabatan seorang Komandan atau Atasan. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, yaitu:

- a. Tidakan Disiplin Militer, dan
- b. Hukuman Disiplin Militer.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 terdapat 2 jenis pelanggaran yang terdiri atas:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer
- b. Perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Dan Jenis hukuman Disiplin Militer terdapat dalam Pasal 9:

- a. Terguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.

Dalam Tindak Pidana Militer, Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif, Hukum Pidana Militer disebut dengan Hukum Pidana khusus yang hanya berlaku bagi:

- a. Prajurit Militer,
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang- undang
- d. Seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Prajurit yang melakukan suatu perbuatan pidana maka telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum. Hukum Pidana Militer bersumber pada KUHPM dan KUHP serta Undang-undang lainnya. Jenis-jenis Hukuman Pidana Militer tercantum dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu:

- a. Pidana-pidana utama:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - a) Seumur Hidup
 - b) Sampai dengan 3 Bulan
 - c) Lebih dari 3 Bulan

- 3) Pidana denda dan kurungan
- 4) Pidana bersyarat (Percobaan)
- b. Pidana-pidana tambahan:
 - 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata (TNI)
 - 2) Penurunan pangkat
 - 3) Pencabutan hak-hak lainnya.

Mengenai kasus pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang dilakukan oleh anggota Militer dengan melakukan pernikahan siri sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh kedinasan. Dalam Proses Penyelesaian Perbuatan Pernikahan siri oleh anggota Militer dilakukan dalam Organisasi TNI.

Terdapat 2 (dua) faktor munculnya dan terungkapnya kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh anggota Militer, yaitu: (1) Terjadi kebocoran atau terungkapnya suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh anggota Militer ke dalam ruang lingkup TNI. (2) Adanya Laporan (Delik aduan).

Pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan segera diproses langsung oleh Penyidik Polisi Militer (Penyidik POM) atas perintah langsung dari Ankum. Setelah Penyidikan dilakukan, Tersangka atau anggota Militer yang melakukan pelanggaran pernikahan tersebut akan dipanggil untuk menghadap Atasan yang berhak menghukum (Ankum) beserta dengan pihak pelapor. Ankum akan melakukan penyidikan secara langsung kepada Tersangka, disamping telah mendapatkan hasil laporan penyidikan dari Penyidik POM.

Ankum akan mengajukan pertanyaan kepada Tersangka dan pelapor yang diterima dalam satuan TNI. Jika Ankum dalam penyidikannya untuk meyakini bahwa telah terjadi Pelanggaran terhadap pernikahan yang dilakukan oleh anggota Militer dengan melakukan pernikahan siri, maka anggota Militer tersebut akan diberikan 2 (dua) cara penyelesaian pelanggaran pernikahan, namun harus atas persetujuan Pasangan Sah secara Agama dan tercatat dalam Negara dan administrasi TNI, yaitu:

- a. Ankum akan memberikan solusi penyelesaian secara damai namun atas persetujuan Pasangan Sah, dengan tidak melanjutkan laporan atau mencabut laporan tersebut dengan syarat dari Ankum yang harus dipatuhi oleh Tersangka, bahwa Tersangka harus segera menceraikan atau memutuskan hubungan dengan pasangan sirinya, serta memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban. Namun, akan tetap diselesaikan oleh satuan tempat anggota Militer tersebut bertugas, dan akan dikenakan pelanggaran terhadap Disiplin Militer dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan pernikahan.
- b. Jika pihak korban atau pelapor tetap ingin melanjutkan laporannya, maka kasus pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan diselesaikan dan diproses menurut Peradilan Militer dalam ranah Pengadilan Militer. Namun Ankum tetap mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh Tersangka agar dapat tetap dipertahankan sebagai anggota Militer, untuk segera menceraikan atau memutuskan hubungan dengan pasangan sirinya.

Ankum memiliki wewenang dan kuasa penuh untuk menentukan golongan pelanggaran bagi anggota Militer yang ada dibawah komandonya langsung

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Pasal 74 yaitu:

Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:

- a. melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
- d. melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Pernikahan yang sah secara Agama, terdaftar dalam Negara, dan mendapatkan izin atasan dalam Kesatuan TNI setelah melakukan Nikah Kantor merupakan Pernikahan yang sah bagi anggota Militer dan pernikahan tersebut menjadi penghalang untuk terjadinya pernikahan lainnya.

Sehingga perbuatan berupa nikah siri merupakan pernikahan yang tidak terdaftar dalam administrasi dan memiliki penghalang karena terdapat pernikahan yang sah sebelumnya. Kasus Pelanggaran terhadap Pernikahan yang dilakukan oleh anggota Militer yang diselesaikan menurut Pradilan Militer diranah Pengadilan Militer, dalam penjatuhan hukuman dan proses penuntutan oleh Oditur harus berdasarkan unsur-unsur pidana, yaitu:

- a. Barang siapa,
- b. Mengadakan Perkawinan,
- c. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Unsur-unsur penuntutan yang dibuat oleh Oditur berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POM pada saat proses penyidikan dan pada saat pemeriksaan hasil penyidikan oleh Oditur. Oditur berdasarkan unsur-unsur yang ditemukan dan berdasarkan alat bukti yang ditemukan menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana dalam Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

- 1) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-5 dapat dinyatakan.

Hal-hal yang menjadi tuntutan Oditur harus berdasarkan unsur-unsur dan alat bukti yang ditemukan, serta proses persidangan dan pembuktian dalam persidangan, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Jika pelanggaran terhadap pernikahan tersebut dapat dibuktikan dalam sidang di Pengadilan Militer, maka putusan Majelis Hakim di siding Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi nikah ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI.

Kesimpulan

1. Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010 menerapkan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Amar putusan memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perkawinan di bawah tangan memenuhi syarat-syarat materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan di bawah tangan tidak tergolong makna perkawinan menurut ketentuan Pasal 279 KUHP. Dalam hal perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri pada perkawinan terdahulunya yang sah, tidak sesuai dengan rumusan Pasal 279 ayat (1) butir ke-1 KUHP. Unsur perkawinan yang dimaksud pada pasal tersebut merujuk pada makna perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. penulis berpendapat penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010 telah benar. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu terpenuhi karena perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pengertian perkawinan yang dimaksud Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis berpendapat untuk mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sudah tepat. Hal ini merupakan sebagai efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana serupa.
2. Pernikahan dalam Organisasi TNI yang dilakukan oleh anggota Militer hanya diakui dan sah menurut organisasi TNI setelah melangsungkan proses pelaksanaan pernikahan menurut peraturan yang telah ada dalam Organisasi TNI. Pernikahan siri merupakan pelanggaran terhadap peraturan pernikahan. Anggota Militer yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit. Dalam proses penyelesaian pelanggaran terhadap pernikahan tersebut dilakukan sepenuhnya berdasarkan atas perintah dan wewenang atasan yang berhak menghukum (Ankum), serta atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POM, dan dari penyidikan yang dilakukan oleh Ankum secara langsung pada saat panggilan terhadap tersangka dan korban (pihak pelapor) untuk menghadap Ankum. Dalam menentukan penggolongan penyelesaian pelanggaran, yang merupakan pelanggaran Disiplin Militer atau Tindak Pidana Militer, harus juga atas persetujuan pasangan sah secara Agama, dan tercatat dalam administrasi TNI. Ankum memberikan 2 pilihan cara penyelesaian, yaitu mencabut laporan dari pihak korban dan tersangka akan dikenakan pelanggaran Disiplin Militer atau pihak korban tetap ingin melanjutkan laporan sehingga akan diproses menuju tahap selanjutnya dan akan dikenakan pelanggaran Tindak Pidana Militer.

Saran

1. Perbaiki regulasi terhadap tindak pidana perkawinan terutama yang terkandung didalam Pasal 279 KUHPidana dan hukuman seharusnya sudah dapat diubah dengan mengedepankan bentuk pertanggungjawaban yang harus

dilaksanakan oleh pihak suami sebagai pelaku perkawinan tidak tercatat, sebab laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang harus mengayomi, mendidik, melindungi, serta menjaga keluarganya dengan sebaik-baiknya.

2. Pelaksanaan Hukum Pidana Militer di Indonesia khususnya dalam kasus pelanggaran terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Anggota Militer dengan melakukan pernikahan siri. Dalam proses pelaksanaan hukuman pidananya, jika anggota Militer tersebut, tetap ingin mempertahankan pernikahan sirinya, seharusnya diberikan suatu kesempatan untuk dapat mengajukan surat pengunduran diri secara hormat kepada kesatuan Organisasi TNI tempat bertugas, sebelum perkara dilanjutkan dan diselesaikan dalam ranah Peradilan Militer. Hal ini sebagai pemenuhan terhadap hak-haknya sebagai warga Negara, yang dapat diperoleh setiap orang dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan begitu juga seorang wanita yang mau menikah dengan Anggota TNI harus terlebih dahulu mencari tahu identitas anggota TNI tersebut agar tidak menjadi isteri simpanan atau isteri siri, pastikan status pernikahan calon suami serta kenali aturan pernikahan anggota TNI agar terhindar menikah dengan pria yang sudah beristeri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hasnawaty, (2023). "Rekonstruksi Kebijakan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, <https://www.pta-bandarlampung.go.id>. Diakses pada tanggal 10 November, Pukul 17.00 Wib.
- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Adji, Sution Usman. (1989). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, (2016). *Hukum Pidana*, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Basir, Abd. (2022). *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, Makassar: Tohar Media.
- Chazawi, Adami, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Dahwal, Sirman. (2016). *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Dwiyono, Agus. dkk, (2014). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bogor: Yudhistira.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hukumonline.com, "Penerapan Pasal 279 KUHP Untuk Kawin Siri Dinilai Belum Konsisten", (16 November 2016), <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada tanggal 10 November 2023, Pukul. 17.05 Wib.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kanter E.Y. dan S.R Sianturi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardjono, Hartono. (1997). *Menegakan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Matnuh, Harpani. (2016). "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, hlm. 899-908.
- Muamar, Akhsin. (2005). *Nikah Bawah Tangan*, Depok: Qultum Media.
- Nurhaedi, Dadi. (2003). *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*, Yogyakarta: Saujana.
- Prawirohamidjojo, Raden Soetojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Raden Wirjono. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rochxy & Bayu Lesmana, (2013). "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 3 Desember, hlm. 262
- Saleh, K Wantjik, (1980). *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sholeh, Abdul Rahman, (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1886). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1A - 1B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Susanti, Dyah Octorina & Efendi, A'an, (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Happy. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia.
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Badung: Alumni.
- Syahuri, Taufiqurrahman. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Graup.

Tobing, Letezia, "Kejahatan terhadap Perkawinan", (14 Februari 2013), <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 10 November 2023, Pukul 17.10 Wib.

Wiludjeng, J.M. Henny. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Wiradipradja, Saefullah. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: Keni Media.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

----- . Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

----- . *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

----- . *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

----- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.